Kabar dari

TIM PENDAMPING PEMETAAN DESA PARTISIPATIF HULU SUNGAI MALINAU

No. 4, Oktober 2000

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu,

Jumpa lagi dengan Tim Pendamping Pemetaan. Pada edisi kali ini kami melaporkan kegiatan studi banding masyarakat dari Hulu Sungai Malinau ke Kabupaten Pasir.

DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: WAKIL MASYARAKAT HULU SUNGAI MALINAU BELAJAR DI KABUPATEN PASIR, KALIMANTAN TIMUR

Banyak perusahaan dan investor bicara tentang rencana pembuatan perkebunan di wilayah Kabupaten Malinau sekarang ini. Sebelum perkebunan ini terlaksana, sebaiknya masyarakat berbincang-bincang dulu dan mempertimbangkan apa yang mungkin akan terjadi baik dari segi baik dan segi yang kurang baik kalau perusahan perkebunan memang masuk.

Pada tanggal 10-20 Agustus, sembilan wakil masyarakat hulu Sungai Malinau berkunjung ke Kabupaten Pasir untuk melihat langsung keadaan kebun kelapa sawit dan bicara dengan petani yang tinggal di tempat. Studi Banding ini terselenggara atas dukungan serta bantuan dari Yayasan Padi dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan harapan masyarakat dari Hulu Sungai Malinau bisa belajar dari pengalaman masyarakat lain dimana sudah ada perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Hulu Malinau dengan pendamping dari CIFOR dan Yayasan Padi datang ke wilayah dimana perkebunan diterima dengan baik, dan dimana masyarakat menolak. Ringkasan hasil kunjungan tersebut tesaji di bawah ini. Kita berharap kunjungan ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat hulu Sungai Malinau untuk membuat keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Tidak semua warga akan setuju dengan keputusan yang akan diambil, tetapi setidaknya penting untuk memperoleh informasi dan saling mendiskusikan pilihan-pilihan dengan sesama warga yang lain. Silahkan bandingkan pengalaman dari desa-desa berikut ini.

Siapa saja wakil masyarakat Hulu Sungai Malinau yang ikut Studi Banding?

Wakil masyarakat Hulu Sungai Malinau yang ikut studi banding di Kabupaten Pasir sebanyak sembilan orang yang terdiri dari Bapak Paulus Irang dari Desa Long Loreh, Bapak Juk Laing dari Desa Gong Solok, Bapak Kaleb Ivung dari Desa Setarap, Bapak Ipu Baya dari Desa Long Lake, Bapak Ncau

Pie dari Desa Long Adiu, Ibu Sarina Aran dari Desa Langap, Ibu Yuslin Ludi dari Desa Tanjung Nanga', serta Ramses Iwan dari Desa Setulang. Studi banding didampingi oleh Njau Anau dari CIFOR, dan Ari Kristiani dan Irfan Hamdani dari Yayasan Padi, salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Balikpapan.



Peserta Tim Studi Banding

Desa mana saja yang dikunjungi oleh rombongan, serta pengalaman apa saja yang mereka peroleh?

Perjalanan Studi Banding adalah ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, khususnya di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Modang, Desa Pekesau, Desa Damit, Desa Bekoso, Desa Lempesu, Desa Lolo, dan HTI di Desa Kerang serta kebun sahang di Desa Batuah Kabupaten Kutai.

DESA MODANG

Bapak Tondy dari Desa Modang bercerita tentang pengalaman masyarakat Desa Modang. Pada awalnya ada penyuluhan dari petugas perkebunan. Yang dijelaskan kepada masyarakat Desa Modang "kebun kelapa sawit yang akan dibuat ini adalah untuk masyarakat," sedangkan untuk ganti rugi atas lahan masyarakat tidak ada karena kebun yang dibuat adalah untuk masyarakat. Dengan penjelasan demikian, masyarakat Desa Modang rela memberi lahan mereka kepada pihak perkebunan dengan harapan mereka akan mempunyai kebun kelapa sawit. Janji dari petugas perkebunan itu tidak disertai dengan surat perjanjian (hitam diatas putih). Masyarakat dengan mudah percaya dengan petugas perkebunan, ditambah pada saat itu yang mendukung dibukanya kebun kelapa sawit di daerah itu adalah petugas keamanan.

Jadi dengan melihat itu masyarakat sudah tidak berdaya untuk menolak apalagi zaman pada saat itu zaman orde baru, kebun buah-buahan masyarakat seperti karet, kelapa, dan lain-lain semua itu diminta oleh petugas untuk ditebang dengan alasan kelihatannya tidak baik. Setelah kebun kelapa sawit berhasil punya masyarakat hanya 1 sampai 2 kapling saja (1 kapling = 200 meter persegi) (dianggap bagian "Plasma" dari perkebunan) sedangkan selebihnya itu dikelolah oleh perkebunan (dianggap bagian "Inti" dari perkebunan). Menurut pak Tondy yang sangat penting kalau kebun kelapa sawit masuk di daerah kita, kita harus membuat perjanjian yang jelas dengan mereka serta dibuat diatas kertas dan ditandatangani kedua belah pihak, diketahui oleh Kades, Camat dan Bupati untuk menghindari jangan sampai terulang lagi kasus seperti Desa Modang.

Sistem peruntukan dan pengelolaan kebun kelapa sawit:

Sistem peruntukan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Modang dilakukan dengan dua cara, yang pertama kebun kelapa sawit dikelola oleh masyarakat sendiri yang dikenal sebagai Plasma. Caranya masyarakat diberi lahan 1 kapling dengan luas 200 meter persegi ditanam dan dipelihara oleh masyarakat sendiri. Pihak perkebunan bisa memberi kredit sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki kapling lebih dari satu, dia bisa mendapat kredit sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Kredit sebesar itu dikembalikan oleh petani setelah kebunnya berhasil dengan cara membayar 30% tiap kali panen. Pengalaman masyarakat di Desa Modang sudah ada yang bisa membayar kreditnya ada juga yang belum lunas. Cara yang kedua kebun sawit itu dipelihara oleh petugas perkebunan kelapa sawit (Inti).

Kebun kelapa sawit kalau di tanam memerlukan waktu 3 tahun baru bisa berbuah, dan masa berbuahnya bisa mencapai 15 tahun.

Menurut pengalaman Bapak Tondy kalau cara masuknya kebun kelapa sawit baik, dengan pengertian perjanjian atau kesepakatan antara pihak perkebunan dengan pihak masyarakat jelas dan transparan, maka dengan sendirinya hasilnya juga akan baik terhadap masyarakat itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama Pak Tondy menyarankan kepada wakil masyarakat Malinau seandainya kebun kelapa sawit masuk di Malinau, sebaiknya 1 rumah tangga mempunyai luas kebun



Berburu dimana? Banyak masyarakat Kab. Pasir menyesal lahan mereka penuh dengan kelapa sawit dan tidak ada ladang, buah-buahan atau hutan lagi

paling kecil 5 kapling baru bisa mendapat hasil yang cukup. Kalau 1 rumah tangga hanya mempunyai satu atau dua kapling itu tidak akan cukup hasilnya hanya cukup untuk dimakan saja.

Kujungan ke pabrik pengolahan kelapa sawit di Desa Modang:

Rombongan juga mengunjungi pabrik pengolahan Sawit di Desa Modang. Menurut petugas yang ada di pabrik sawit karyawan pabrik sawit sejumlah 280 orang. Salah satu syarat pembangunan sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit adalah lahan perkebunannya harus mencapai luas 10.000 hektar.

Pengalaman yang bisa diambil dari Desa Modang adalah:

- Jangan mudah mempercayai janji pihak luar yang membuat kesepakatan dengan kita tanpa di sertai dengan surat perjanjian yang jelas.
- Yang sangat penting kalau kebun kelapa sawit masuk di daerah kita, kita harus membuat perjanjian yang jelas dengan mereka serta dibuat diatas kertas dan ditandatangani kedua belah pihak, diketahui oleh Kades, Camat dan Bupati.
- Kalau cara masuknya kebun kelapa sawit baik, dengan pengertian perjanjian atau kesepakatan antara pihak perkebunan dengan pihak masyarakat jelas dan transparan, maka dengan sendirinya hasilnya juga akan baik terhadap masyarakat itu sendiri.

DESA PASIR MOYANG

Menurut Kepala Desanya, Bapak Sabri HS, sebagian besar lahan pertanian masyarakat di Desa Pasir Moyang ditanami dengan kelapa kelapa sawit, tetapi anehnya tidak seorangpun masyarakat Pasir Moyang yang memiliki kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit masuk di daerah mereka dulu dijaga dengan pagar betis oleh petugas keamanan. Masyarakat Pasir Moyang pada saat itu tidak bisa berbuat banyak selain hanya bisa menonton saja. Orang yang mengerjakan kebun kelapa sawit di daerah mereka adalah orang dari luar desa. Pengalaman seorang bapak menjelaskan bahwa pertama kali kebun kelapa sawit masuk di desa mereka janji petugas kebun kelapa sawit pada saat itu 'Kebun kelapa sawit yang dibuat ini milik masyarakat jadi tidak perlu ada ganti rugi dari pihak perusahaan.'

25 hektar lahannya bapak ini dia serahkan kepada pihak perkebunan kelapa sawit dengan harapan dia akan mendapat kebun kelapa sawit sesuai dengan janji petugas perkebunan. Namun, yang terjadi sampai sekarang bapak ini tidak mempunyai kebun kelapa sawit sama sekali. Menurut bapak ini masyarakat Desa Pasir Moyang dan Modang pernah menuntut janji pihak perusahaan perkebunan yang dulunya mengatakan bahwa kebun yang dibuat milik masyarakat tapi sampai sekarang belum ada hasil. Menurut bapak ini kehidupan masyarakat sebelum ada kebun kelapa sawit itu lebih baik

karena masih banyak lahan perladangan dan buah-buahan masyarakat yang bisa dipanen kapan saja. Tetapi setelah ada kebun kelapa sawit kehidupan masyarakat semakin sulit karena buah-buahan yang ada sudah habis ditebang, lahan perladangan masyarakat berubah menjadi lahan kebun kelapa sawit. Harga kelapa sawit bisa dimainkan oleh pabrik kelapa sawit.

Pengalaman yang bisa diambil dari Desa Pasir Moyang adalah:

- Jangan mudah menyerahkan lahan kita kepada orang lain tanpa ada kesepakatan yang jelas dari orang tersebut.
- Jauh lebih baik mengembangkan kebun kopi, kakau dan lada, karena kita bisa bebas menjualnya, dan harga tidak bisa dimainkan oleh orang lain, lahan kita tidak akan hilang
- Kehidupan masyarakat sebelum ada kebun kelapa sawit itu lebih baik karena masih banyak lahan perladangan dan buah-buahan masyarakat yang bisa dipanen kapan saja.
- Setelah ada kebun kelapa sawit kehidupan masyarakat semakin sulit.

DESA BEKOSO

Menurut masyarakat Bekoso kebun kelapa sawit masuk di Desa Bekoso pada tahun 1988. Masyarakat diminta untuk menyerahkan lahan masyarakat kepada pihak perkebunan dengan janji bahwa kebun sawit akan diberikan kepada masyarakat yang punya lahan, tetapi tidak ada surat perjanjiannya.

Petugas perkebunan sawit pada saat itu mengatakan bahwa kebun kelapa sawit itu lebih menguntungkan masyarakat. Masyarakat tidak bisa menuntut perkebunan karena perkebunan ini milik Negara. Dengan adanya janji manis yang disampaikan oleh petugas perkebunan akhirnya masyarakat Desa Bekoso dan Damit rela menyerahkan lahannya kepada pihak perkebunan, dengan harapan mereka akan mendapat kebun sawit setelah itu. Setelah kebun sawitnya tumbuh, yang terjadi adalah masyarakat di Desa Bekoso, Damit dan Lempesu tidak mempunyai kebun kelapa sawit. Masyarakat Bekoso dan Damit mengakui kesalahan ada pada pihak masyarakat karena dengan mudah mempercayai janji pihak perkebunan tanpa disertai surat perjanjian.

Setelah lahan diserahkan, yang pertama dilakukan adalah penyuluhan tentang kebun kelapa sawit kepada masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka lahan pembibitan kelapa sawit. Lahan masyarakat desa diminta dengan janji masyarakat akan dilibatkan dalam perkebunan. Setelah lahan diserahkan oleh masyarakat kayu-kayu yang ada dalam lahan tidak bisa diambil lagi oleh masyarakat selain oleh pihak perkebunan. Realisasi dari janji pihak perkebunan dengan masyarakat

Bekoso yang mengatakan masyarakat akan dilibatkan dalam perkebunan sampai sekarang masyarakat disana tidak ada yang punya kebun sawit.

Menurut masyarakat Desa Bekoso, Damit dan Lempesu, penduduk asli Dayak Paser, sebelum ada kebun kelapa sawit mereka bisa hidup dengan baik karena masih punya lahan perladangan dan kebun buah-buahan yang luas. Tetapi setelah ada kebun kelapa sawit lahan perladangan tidak ada lagi karena penuh dengan kebun kelapa sawit, bahkan kampung mereka dikelilingi oleh sawit.



Petani Pasir periksa buah kelapa sawit

DESA LEMPESU

Kebun kelapa sawit masuk di Desa Lempesu terjadi pada tahun 1981. Pada awal masuknya ada penyuluhan dari pihak perkebunan bahwa kebun akan dibuka di tempat itu untuk masyarakat. Setelah itu masuk traktor yang mengambil kayu-kayu di daerah itu sampai habis. Setelah itu diganti dengan perusahaan yang lain yaitu perusahaan yang khusus menanam sawit. Promosi perusahaan sawit itu pada awalnya minta kepada masyarakat desa untuk menanam dan merawat kebun itu sendiri untuk masyarakat sambil memasang papan pengumuman di lokasi penanaman "Kebun milik masyarakat lokal" atau dikenal dengan istilah "Plasma". Setelah kebun sudah mulai berhasil, secara diam-diam papan pengumuman yang berbunyi milik masyarakat lokal berubah tanpa diketahui oleh masyarakat menjadi "Kebun milik perkebunan kelapa sawit" atau dikenal dengan "Inti". Masyarakat Desa Lempesu sama nasibnya dengan masyarakat Bekoso lahannya penuh dengan kebun sawit, tetapi masyarakat tidak ada yang punya kebun kelapa sawit.

Masyarakat sudah cukup sabar dan menderita selama 14 tahun karena belum juga punya kebun sawit. 880 KK masyarakat Desa Lempesu akan menuntut perkebunan sawit minta supaya kebun Inti diberikan kepada masyarakat lokal "Plasma" sesuai janji mereka pada waktu masuk dulu.

Menurut Bapak Syarib kerugian dari kebun kelapa sawit adalah harga sawit bisa dimainkan oleh pihak perusahaan, kadang-kadang rekayasa timbangan, kadang-kadang alasan mutu buah sawit. Kebun buah-buahan tidak ada, karena sengaja disuruh tebang supaya tidak ada bukti bahwa masyarakat hidup di tempat itu, dan posisi masyarakat jadi tidak kuat.

Menurut masyarakat Lempesu lamanya masa panen kelapa sawit selama 15 tahun setelah itu buahnya tidak baik lagi. Menanam tanaman lain di bekas lahan kebun kelapa sawit harus menunggu selama 5 tahun dulu.

Pesan masyarakat Lempesu lebih baik masyarakat Malinau menanam kopi, lada dan karet, karena harganya tidak bisa dimainkan oleh pihak perusahaan, masyarakat tidak akan kehilangan lahan perladangan.

Kalau misalnya kebun kelapa sawit masuk di daerah Malinau masyarakat harus membuat perjanjian dan realisasi dari perjanjian itu harus cepat. Anak-anak yang masih kecil harus didaftarkan semua, untuk menjaga masa depan.

DESA DAMIT

Di Desa Damit ditemukan bahwa lahan sudah tidak ada yang kosong habis ditanam kelapa sawit, yang anehnya itu bukan milik masyarakat tetapi milik perkebunan kelapa sawit. Punya masyarakat cuma 0,5 hektar saja.

DESA PEKESAU

Di Desa Pekesau rombongan bertemu dengan kepala desa dan ketua koperasi. Kepala desa menjelaskan bahwa 80% petani sawit yang ada di Desa Pekesau adalah dari Transmigrasi. Sedangkan 20% dari itu adalah masyarakat asli di Desa Pekesau. Menurut kepala Desa Pekesau kebun kelapa sawit ini sangat baik buat masyarakat karena bisa mempunyai penghasilan yang tetap tiap bulan.

DESA LOLO

Pengalaman pak Aldin petani sawit yang punya kebun kelapa sawit satu kapling, penghasilannya dalam satu bulan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu hanya cukup untuk makan. Bapak Aldin menceritakan bagaimana cara yang dipakai oleh pihak perkebunan pada awal masuknya, "masyarakat dipaksa menebang pohon buahnya sendiri dan kebun rotan masyarakat, tanpa ada ganti rugi". Kebun buah masyarakat ditebang dengan alasan tidak cantik menurut petugas kebun sawit.

DESA BATUAH

M. Junaidi menceritakan tentang pengalaman masyarakat Batuah hampir semua masyarakat yang ada di Desa Batuah adalah pendatang dari Sulawesi suku Bugis. Mereka hampir semua bertani sahang (lada, merica). Kebun mereka paling sedikit 500 pohon. Berkebun sahang pada awalnya harus berani menderita selama 3 tahun, setelah itu baru kita bisa menikmati hasilnya. Berkebun sahang jarak tanamnya satu depa dan tinggi tiangnya 3 meter dan tanahnya kalau tanah merah dan hitam sahangnya pasti baik. Kalau tahan pasir itu tidak baik. Masyarakat di Batuah sampai saat ini mereka sudah cukup berhasil dalam mengusahakan kebun sahang bahkan sudah banyak yang naik haji hanya dari hasil kebun sahang. Dibandingkan kalau hidup dengan cara buat ladang, dengan berkebun sahang jauh lebih banyak hasilnya: 1 kilogram sahang bisa membeli beras untuk 2 minggu. Setelah diskusi di rumah dilanjutkan dengan meninjau ke lapangan melihat langsung kebun sahang serta cara-cara perawatan dan cara mengambil bibit sahang.



Kunjungan ke kebun sahang

HIKMAH YANG DIAMBIL OLEH PESERTA DARI PERJALANAN STUDI BANDING INI ADALAH:

- Jangan mudah mempercayai janji pihak luar yang membuat kesepakatan dengan kita tanpa disertai dengan surat perjanjian yang jelas dan ditandatangani kedua belah pihak, diketahui oleh Kades, Camat dan Bupati.

- Menurut sebagian masyarakat, kelapa sawit baik dari segi bisa ada hasil tiap bulan. Sebaiknya 1 rumah tangga mempunyai luas kebun paling kecil 5 kapling baru bisa mendapat hasil yang cukup.

- Menurut kebanyakan masyarakat, jauh lebih baik mengembangkan kebun kopi, kakau dan lada, karena kita bisa bebas menjualnya, dan harga tidak bisa dimainkan oleh orang lain. Lahan kebun kita tidak akan hilang.

- Kalau kebun buah-buahan masyarakat di tempat tidak ada posisi masyarakat jadi tidak kuat. Pihak perkebunan sengaja menebang pohon supaya bukti masyarakat hidup di tempat itu tidak ada,

- Hidup sebelum ada kebun kelapa sawit itu lebih baik karena masih banyak lahan perladangan dan buah-buahan masyarakat yang bisa dipanen kapan saja. Tetapi setelah ada kebun kelapa sawit kehidupan masyarakat semakin sulit karena buah-buahan yang ada sudah habis ditebang, lahan perladangan masyarakat berubah menjadi lahan kebun kelapa sawit. Harga kelapa sawit bisa dimainkan oleh pabrik.

Dibandingkan kalau hidup dengan cara buat ladang, dengan berkebun sahang jauh lebih banyak hasilnya. Satu kilogram sahang bisa membeli beras untuk 2 minggu. Pak Paulus Irang dari Desa Long Loreh membandingkan kebun kelapa sawit dengan jenis kebun yang lain dengan gambaran sebagai berikut:

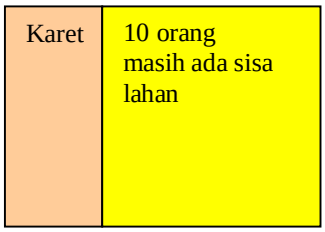
Kebun kelapa sawit

10 org lahan habis dibagi

Kebun kelapa sawit

1. Kerjanya cukup berat
2. Hasilnya tidak bisa dijual Umur: 20 s/d 30 th kurang berhasil
3. Luas: 1 kapling (2 hektar)
4. kemana-mana kecuali ke perusahaan itu sendiri dan terikat
5. Hasilnya = Rp. 200000 s/d 500.000/bulan
6. Tidak bisa di olah sendiri
7. Kayu habis dan binatang buruan tidak ada lagi
8. Obat-obatan tradisional habis musnah
9. Areal tempat buat kebun yang lain tidak ada

Kebun karet



Kebun karet

1. Umur: 80 s/d 100 Tahun
2. Luas: 1 hektar
3. Hasil: 300.000 s/d 400.000/bulan
4. Kerja cukup ringan
5. Hasil bisa dijual kemana-mana
6. Lahan tempat buat kebun buah-buahan masih ada

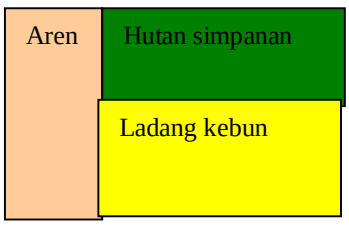
Kebun kopi



Kebun kopi

1. Umur kopi: 40 s/d 60 tahun
2. Luas: 1 hektar
3. Hasilnya: Rp. 500.000 s/d Rp. 1000.000,-
4. Kerja cukup rumit tapi ringan
5. Bebas dijual kemana-mana
6. Bisa di olah sendiri
7. Penyakitnya kurang
8. Tempat berladang, berkebun, berburu masih ada

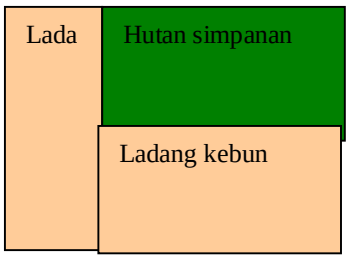
Kebun aren



Kebun aren

1. Umur: 40 s/d 60 tahun
2. Luas: 1 hektar
3. Hasilnya: Rp. 600.000 s/d 1.200.000,-
4. Kerjanya cukup berat
5. Bisa di olah sendiri
6. Hasilnya bisa dijual bebas kemana-mana
7. Lahan berladang, berkebun dan berburu masih ada.

Kebun lada



Kebun lada

1. Umur: 30 s/d 35 tahun
2. Luas: 1 hektar
3. Hasilnya: Rp. 6.000.000 s/d Rp. 8.000.000,-
4. Kerja cukup rumit tapi ringan
5. Hasilnya bebas dijual kemana-mana
6. Bisa diolah sendiri
7. Binatang buruan, tempat berladang dan berkebun masih ada
8. Kayu hutan rimba masih utuh yang tinggal

TINDAK LANJUT OLEH ANGGOTA PESERTA STUDI BANDING:

Dengan kunjungan studi banding ke 8 desa di Pasir, menurut Ibu Yuslin Ludi dari Desa Tanjung Nanga', "Kami tidak mau masyarakat Malinau akan seperti Kabupaten Pasir." Bapak Kalep Ivung dari Desa Setarap mencatat "Dari rombongan atau saya sendiri…minta untuk menghindarkan dan menolak kedatangan kebun kelapa sawit atau HTI atau yang berkaitan dengan perusahaan perkebunan di daerah kami yaitu di daerah sungai Malinau. Mohon bapak/ibu/sdr memberi jalan dan petunjuk kepada kami…supaya kami jangan sampai seperti masyarakat di Kabupaten Pasir. "

Peserta Studi Banding Pasir akan menyelengarakan penyuluhan di desa-desa di Hulu Sungai Malinau setelah musim ngugal selesai untuk sebarkan pengalaman yang mereka dapat. Ada juga kesempatan belajar tentang pengalaman ini bersama pada lokakarya "Bangun Agenda Bersama II (CIFOR dan masyarakat Hulu Malinau) " pada akhir bulan November 2000.

Perubahan di Kabupaten Malinau terjadi begitu cepat. Tetapi tidak harus cepat-cepat mengambil keputusan. Kumpulkan dulu informasi yang diperlukan dan diskusikan informasi ini dengan sesama warga masyarakat. Sebelum mengambil keputusan apapun yang mungkin mempunyai dampak penting terhadap keluarga, kehidupan dan tanah atau alam dimana kita bergantung, pastikan untuk membahas dulu kekuatan dan kelemahan dari setiap pilihan. Dengan keadaan zaman reformasi, banyak kesempatan menarik yang menunggu bagi mereka yang berhati-hati dalam perencanaan. Semoga bemanfaat dan salam sejahtera !

Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama yang baik.

Hormat kami,

Tim Pendamping Pemetaan

Godwin Limberg	Njau Anau
Miriam van Heist	Made Sudana
Sargius Anyie	Nyoman Wigunaya
Ramses Iwan	Asung Uluk
Salmon Alfarisi	Lini Wollenberg

(Foto-foto oleh Njau Anau)



Apakah CIFOR?

CIFOR adalah lembaga penelitian internasional independen yang dibentuk pada tahun 1993 sebagai tanggapan terhadap kepedulian global akan konsekuensi-konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomis dari degradasi hutan. *CIFOR* menghasilkan dan mendorong alih pilihan-pilihan kebijakan dan teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan untuk pengelolaan hutan lestari. CIFOR bukan perusahaan, dan bukan instansi pemerintah. CIFOR salah satu jenis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penelitian.

Apa Tujuan CIFOR?

- Meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai
- pengelola hutan.
- Meningkatkan produktivitas dan kelestarian sistem hutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Memahami hubungan timbal balik antara lingkungan biologis, fisis, sosial dan ekonomi di dalam sistem hutan dan kehutanan.
- Menyediakan analisis, informasi dan saran-saran untuk pengambilan keputusan di bidang hutan dan tata guna hutan.
- Meningkatkan kemampuan penelitian nasional.

CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang Dalam
Bogor Barat 16680
Telp. (0251) 622-622
Fax. (0251) 622-100

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596 JKPWB
Jakarta 10065

****